

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Jepang, sebuah negara kecil yang selama dasawarsa ini telah menyanggah nama besar. Kehancuran fisik yang dialaminya karena kekalahannya dalam PD II, ternyata tidak turut menghancurkan mental masyarakat Jepang. Dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka mampu bangkit kembali dari kehancurannya dan berubah menjadi raksasa ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Kemajuan yang dialami oleh Jepang tentu saja tidak terlepas dari peran politik luar negerinya, terutama setelah adanya San Francisco Treaty. San Francisco Treaty merupakan awal tonggak sejarah bagi bangsa Jepang setelah pendudukan sekutu karena Jepang diberikan kemandirian dan kedaulatan penuh atas pemerintahannya termasuk didalamnya terkait dengan politik luar negeri Jepang. Karena uraian yang diungkap diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memilih “Politik Luar Negeri Jepang pasca San Francisco Treaty s.d.1980” sebagai judul skripsi. Akhirnya ketersediaan bahan dan sumber data yang diperlukan merupakan faktor pendukung yang sangat penting dan menunjang dalam penelitian ini. Sehingga dengan tersedianya bahan dan data tersebut akan membantu terselesaikannya tulisan ilmiah ini

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kekalahan Jepang dalam perang dunia II oleh sekutu, ditandai dengan hancurnya dua kota utamanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dengan di jatuhkannya Bom Atom pada 9 dan 14 agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 agustus 1945.<sup>1</sup> Pada saat itu pemimpin Jepang dan rakyatnya dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa nasib mereka saat itu menjadi bangsa yang ditundukkan akibat kalah dalam perang. Berakhirnya PD II telah menempatkan Jepang pada titik terendah dalam sejarahnya dalam bidang politik, ekonomi maupun militer. Kondisi semacam ini diperparah oleh lingkungan eksternalnya yang sangat membenci Jepang akibat kebrutalannya selama PD II.

Situasi yang kontradiktif terjadi sebelum PD II, ketika Jepang secara tegas mengejar kepentingan-kepentingan nasionalnya dengan menunjukkan politik luar negeri yang berdiri sendiri. Dalam membentuk persekutuan dengan negara-negara lain, seperti dalam blok poros Tokyo-Berlin-Roma, Jepang tetap menunjukkan kebebasan yang besar.<sup>2</sup>

Sebelum Restorasi Meiji, politik luar negeri ditentukan oleh sikap menolak terhadap semua bangsa di dunia, yaitu ketika Shogunat Tokugawa melakukan isolasi total.<sup>3</sup> Tidak ada bangsa lain yang diizinkan masuk Jepang, kecuali Belanda yang masih diperbolehkan membuka perwakilan dagang di pulau Deshima diteluk Nagasaki. Politik isolasi bermaksud untuk menolak

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) diakses tanggal 8 mei, 2007

pengaruh dari luar negeri terhadap Jepang, khususnya terhadap perluasan agama Kristen.<sup>4</sup> Ketika itu Jepang tidak hanya menutup pintunya bagi pihak luar, tetapi juga tidak bergerak keluar. Sebelumnya Jepang mengadakan hubungan dengan Cina. Bahkan pernah mengadakan operasi militer ke Korea. Toyotomi Hideyoshi menyerang Korea dengan tujuan ambisius untuk menaklukan Cina. Meskipun mula-mula ada kemajuan, tetapi kemudian mengalami problema-problema logistik sehingga terpaksa kembali ke Jepang. Tokugawa Iyeyasu dan Shogun-Shogun Tokugawa berikutnya tidak pernah lagi mengulangi aksi Toyotomi Hideyoshi meskipun Jepang menjadi kokoh dalam dan berkepentingan di Korea.

Setelah Restorasi Meiji dan runtuhnya Shogunat Tokugawa, politik isolasi tak dapat berlangsung lagi. Mula-mula politik luar negeri ditujukan untuk turut menyelenggarakan semboyan “*somo joi*” dan “*fukoku kyohei*”.<sup>5</sup> Ini masih merupakan politik yang bersifat defensif, yaitu bagaimana menghilangkan hak-hak ekstraterritorial bangsa-bangsa Eropa dan AS di bumi Jepang dan membuka kemungkinan bagi Jepang agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dunia barat. Tetapi lambat laun sikap defensif tidak lagi dirasakan cukup. Jepang mulai merasa perlu juga untuk mempunyai daerah jajahan seperti negara-negara Eropa yang menjadi model tiruannya. Alasannya adalah untuk memperoleh sumber-sumber bahan untuk industrinya dan sebagai pasaran untuk hasil produksinya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.275

<sup>5</sup> Leo Agung S, “*Capita Selecta*”, *Sejarah Asia Timur*, UNS, 2000, hal 133. ‘*somo joi*’ artinya kesetiaan terhadap dan cinta tanah air. *Kiyoh* (kebersihan) yang dimaksud disini adalah orang-orang ‘*fukoku*’

Sejak akhir abad ke-19 Jepang telah mulai bersikap agresif terhadap wilayah terdekat di sekitarnya. Pertama kali Jepang perang dengan Cina dan berakhir pada tahun 1895 dan Jepang berhasil memperoleh pulau Taiwan serta beberapa bagian daratan Cina. Sedangkan pengaruhnya di Korea mulai nyata sekalipun secara resmi baru setelah menjadi jajahannya pada tahun 1910. Karena perluasan pengaruh di Cina, Jepang cepat bertentangan kepentingan dengan Rusia di Manchuria. Kepentingan Rusia di Manchuria pun besar, karena adanya wilayah Rusia dipantai pasifik. Nampaknya kemenangan atas Cina membuat Jepang yakin akan kekuatan angkatan perangnya sehingga amat diandalkan dalam mengejar politik luar negerinya. Maka pertentangan kepentingan dengan Rusia tidak hanya diusahakan untuk diselesaikan secara diplomasi, tetapi juga menggunakan kekuatan militernya. Akhirnya terjadi perang antara Jepang dengan Rusia pada tahun 1904-1905.<sup>6</sup> dalam perang itu Jepang membuktikan kemajuan besarnya dalam membentuk kekuatan militer yang setaraf dengan dunia Eropa. Dunia dibuatnya terpesona, oleh karena di daratan maupun di lautan, Rusia dikalahkan secara menentukan sekalipun membawa korban besar di kedua pihak. Dengan kemenangan ini industri Jepang memperoleh daerah penghasil bahan-bahan baku dan daerah pasaran untuk produksinya yang luas.

Aktifitas ekspansionis terus dilakukan Jepang demi mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini membuat khawatir AS dan Eropa karena berbenturan dengan kepentingan mereka. Dalam pertentangan kepentingan itu

---

<sup>6</sup> Sayidiman Suryohardiprojo, *Op. cit*, hal.275

Jepang melihat perkembangan Jerman dibawah pimpinan Hitler, dan Italia dibawah pimpinan Mussolini yang juga bertentangan kepentingan dengan AS, Inggris dan sekutu-sekutunya. Maka bisa dimengerti bila Jepang mengusahakan suatu persekutuan dengan Jerman dan Italia, tindakan ini membawa Jepang dalam PD II. Secara resmi PD II mulai berkecamuk pada tanggal 1 september 1939 sampai tanggal 14 agustus 1945.<sup>7</sup> sedangkan Jepang terjun dalam PD II pada bulan desember 1941, seperti yang telah diketahui bahwa mula-mula Jepang amat berhasil, tetapi akhirnya dikalahkan oleh AS dan Sekutunya. Terbukti bahwa keunggulan kemampuan militer saja tidak cukup dalam dalam pertengahan abad ke-20, harus ada juga kekuatan industri dan teknologi yang memadai. Maka hancurlah Jepang tidak saja oleh senjata konvensional, tetapi juga merasakan bom atom.<sup>8</sup>

Kekalahan Jepang dalam PD II oleh sekutu, memaksa Jepang kehilangan dua kota utamanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dengan dijatuhkannya Bom Atom pada 9 dan 14 agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 agustus 1945. pada saat itu pemimpin Jepang dan rakyatnya dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa nasib mereka saat itu menjadi bangsa yang ditundukkan akibat kalah dalam perang.

Bagi bangsa Jepang inilah untuk pertama kali dalam sejarah Jepang mengalami masa pendudukan oleh sekutu. Pendudukan oleh sekutu ini, mempunyai tujuan jelas yaitu mencegah Jepang agar tidak lagi menjadi ancaman bagi AS dan bagi dunia Internasional. Angkatan perang Jepang yang

---

<sup>7</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) diakses tanggal 8 mei, 2007

<sup>8</sup> ... ..

sebelumnya sangat dibanggakan seketika itu berubah menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh rakyatnya. Para pemimpin mereka dianggap sebagai penjahat besar dan pencuri pajak yang menyebabkan kesengsaraan rakyat. angkatan perang secara total dibubarkan oleh sekutu, sejumlah enam juta tentaranya ditarik mundur dari luar negeri dan didemobilisasi. selanjutnya keamanan Jepang dijamin oleh *SCAP* (Supreme Commander For Allied Powers) yang menduduki Jepang pada tahun 1946. Namun karena yang berada dibalik *SCAP* ini sebenarnya adalah pemerintah AS, Pemerintah *SCAP* ini sering disebut sebagai tentara pendudukan AS yang dipimpin oleh Jendral Douglas McArthur. Tugas Jendral Douglas McArthur sebagai pimpinan *SCAP* ialah menjalankan politik pendudukan untuk negara-negara sekutu di Jepang. Tetapi dalam kenyataannya yang dijalankan ialah politik AS.<sup>9</sup>

Selama masa pendudukan ini Jendral McArthur menjalankan beberapa kebijaksanaan, antara lain: (1) Merubah industri militer Jepang menjadi industri barang-barang konsumen; (2) Menghancurkan kekuatan militer Jepang; (3) Membubarkan kekuatan *zaibatsu* (Konglomerasi gaya Jepang yang sampai Perang Dunia II merupakan penyumbang dana terbesar bagi kepentingan militer Jepang); (4) Selain itu pemerintah pendudukan sekutu juga mengganti UU Meiji dengan konstitusi 1947 pasal 9 sebagai dasar politik luar negeri Jepang supaya menanamkan sifat perdamaian dan menolak perang terutama dalam mengatasi sengketa-sengketa internasional. Bagi sebagian bangsa Jepang era awal pendudukan merupakan suatu periode refleksi yang dalam

rakyat Jepang siap menerima apapun yang akan diberikan oleh tentara pendudukan Jendral McArthur, pemimpin *SCAP*, yang mulai memperkenalkan demokrasi kepada bangsa Jepang. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri bangsa Jepang dan untuk menekan watak perdamaian pada bangsa Jepang.<sup>10</sup>

Selama beberapa tahun dibawah pemerintahan pendudukan, sebenarnya Jepang menjadi pihak pengikut yang setia karena Jepang tidak mempunyai politik luar negeri sendiri sebab selama pendudukan *SCAP*, semua urusan pemerintahan berada di bawah kendali *SCAP*. Sampai akhirnya Jepang mendapatkan kembali kemerdekaannya dengan ditandatanganinya *San Francisco Treaty* pada tanggal 8 September 1951 oleh semua negara yang terlibat dalam perang melawan Jepang sejumlah 49 negara kecuali Uni Soviet dan RRC. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan kekuasaan dan kedaulatan kepada pihak Jepang atau perjanjian ini mulai diratifikasi pada tanggal 28 April 1952.<sup>11</sup> *San Francisco Treaty* ini membebaskan *SCAP* dari tanggung jawabnya atas pemerintah Jepang.

Pada saat Jepang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1952, negara tersebut terlalu lemah untuk mempertahankan dirinya sendiri dari ancaman eksternal, sementara kondisi politik internasional saat itu diwarnai ancaman-ancaman dibidang politik dan keamanan.

Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti politik luar negeri Jepang pasca penandatanganan San Francisco Treaty.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.119

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.120

### **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka timbul suatu permasalahan sebagai fokus penelitian dengan pertanyaan :

“Bagaimana karakteristik Politik Luar Negeri Jepang pasca penandatanganan San Francisco Treaty pada tahun 1952-1980?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui politik luar negeri seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pasca penandatanganan San Francisco Treaty.
2. Sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima dibangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.
3. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **E. Kerangka Dasar Teori**

Untuk dapat menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis mencoba menerapkan beberapa Teori dan konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar pengkajian masalah ini semakin terarah dan jelas. Adapun Teori dan konsep yang penulis gunakan untuk

mengkaji dan meneliti politik luar negeri Jepang pasca penandatanganan San Francisco Treaty adalah Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri, Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Kedaulatan Sebelum menguraikan teori yang dipakai didalam menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan disampaikan apa yang disebut teori itu sendiri. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi.<sup>12</sup>

### **1. Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri**

Dalam membahas permasalahan yang timbul dalam dalam skripsi ini penulis juga menggunakan **Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri** atau *foreign policy* oleh **William D. Coplin**, yang berasumsi:

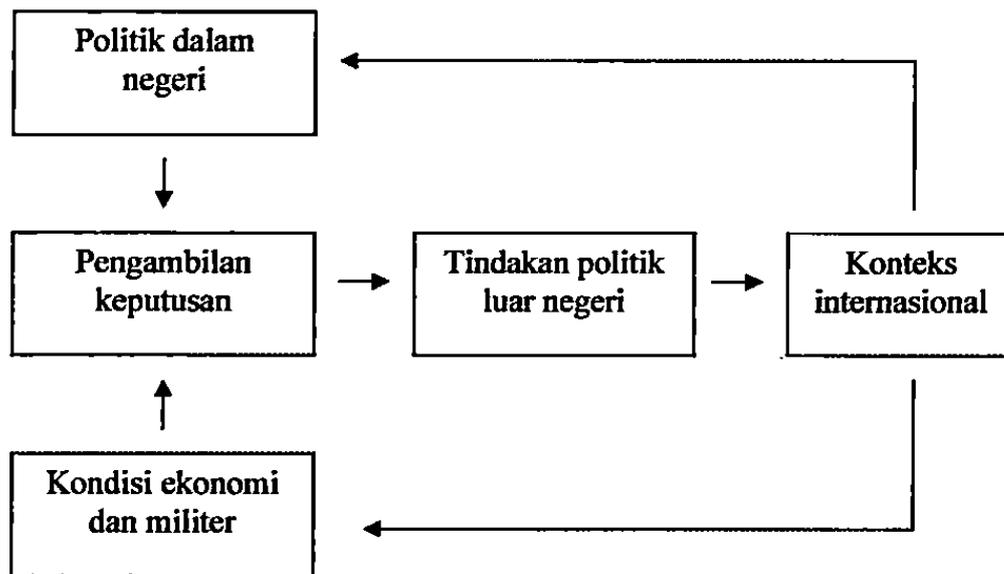
“ akan tetapi salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari ketiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kedua, kemampuan

---

<sup>12</sup> Mochtar Mas'ud, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional* (DAU UGM Yogyakarta)

ekonomi dan militer, dan ketiga, konteks internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungan dengan negara lain dalam system itu".<sup>13</sup>

Gambar 1.1  
*skema Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri William D. Coplin*



Sumber : William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung, CV Sinar Baru, 1992, hal. 30.

Dari skema tersebut, terlihat kaitan-kaitan antara kondisi ekonomi, militer, politik dalam negeri dan konteks internasional, disini diartikan sebagai produk dari berbagai politik luar negeri pada masa lampau.

Coplin menekankan bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah orang-orang yang memegang peran dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh aktual dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan

<sup>13</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung, CV Sinar Baru, 1992, hal. 30.

negaranya dalam hubungan dengan aktor lain. Pengambilan suatu tindakan luar negeri sebenarnya lebih merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak pertimbangan dan sangat kompleks.

Seperti yang diasumsikan oleh Coplin bahwa tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari ketiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kedua, kemampuan ekonomi dan militer, dan ketiga, konteks internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungan dengan negara lain dalam system itu. Begitu juga dengan Jepang dalam pengambilan keputusan politik luar negeri pasca PD II cenderung bersikap terbuka, cenderung bilateral dan berpusat atau mengekor pada Amerika. Hal ini dilakukan Jepang karena melihat situasi politik dalam negeri Jepang yang belum stabil akibat kekalahan dalam PD II. Pertimbangan yang kedua adalah Jepang belum memiliki kemampuan secara ekonomi dan militer setelah demiliterisasi yang dilakukan oleh SCAP. Dan juga perekonomian Jepang yang masih porak-poranda akibat menderita kekalahan perang. Pertimbangan yang ketiga adalah konteks Internasional dimana pada saat itu situasi perpolitikan internasional sedang panas-panasnya karena adanya konflik antara AS dan Uni Soviet. Jadi berdasarkan ketiga faktor tersebut yang menjadikan pertimbangan Jepang dalam menentukan arah politik luar negerinya.

Perdana Menteri Yoshida sebagai aktor yang memegang peran dalam pengambilan keputusan politik luar negeri memiliki tanggung jawab resmi

dan pengaruh aktual, Sangat tepat dalam menentukan strategi pengambilan kebijakan politik luar negeri Jepang. Sikap ini diambil oleh Jepang sebagai produk dari berbagai politik luar negeri pada masa lampau atau sebelum PD II, dimana politik luar negeri Jepang sangat agresif dan ekspansionis yang akhirnya membawa Jepang dalam kehancuran. Oleh karena belajar dari pengalaman maka Jepang tidak ingin melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Coplin. Jadi arah politik luar negeri Jepang setelah PD II terfokus pada bidang ekonomi yaitu perdagangan dan investasi. Hal ini terbukti dengan kemajuan dialami Jepang sehingga menjadi raksasa ekonomi beberapa tahun kemudian.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional dikenal sebagai salah satu konsep yang paling populer di dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur dasar yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>14</sup>

Oleh karena itu para pengambil keputusan di suatu negara akan sangat berpihak terhadap Kepentingan Nasionalnya untuk dapat melindungi dan

---

<sup>14</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clive Broom Ltd, England, 1982, hal. 7

mempertahankan identitas-identitasnya. Hal tersebut dilakukan untuk survival, atau kelangsungan hidupnya sebagai negara. Karena didalam politik dunia Internasional terdapat persaingan antar negara maupun bangsa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di dunia. Kepentingan Nasional bukan hanya kepentingan negara namun juga kepentingan bangsa, yang hal tersebut ingin dicapai untuk mewujudkan keinginan bersama suatu bangsa atau negara, seperti kesejahteraan rakyatnya serta untuk dapat berkuasa di dunia.

Serta menurut pemikiran-pemikiran dasar rakyat, kepentingan nasional adalah berarti adanya kebebasan, ketertiban, keamanan, kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan bagi kehidupan bangsa. Sehingga kepentingan nasional termasuk kedalam visi dan diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk kemudian dipergunakan dalam rangka ketertiban internasional, hal ini dibuat dalam rangka merumuskan politik luar negeri suatu negara.

Dengan ditanda tangannya Perjanjian San Francisco telah memberikan kemerdekaan kepada Jepang untuk memerintah pemerintahanya secara mandiri, baik yang berhubungan dengan politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Ini merupakan salah satu Kepentingan Nasional Jepang yang ingin dicapai

Perkembangan ekonomi secara pesat yang dialami oleh Jepang, tidak terlepas dari politik luar negeri Jepang yang mengekor pada sikap Amerika.

Jamian keamanan yang diperoleh Jepang membuat Jepang lebih lanjut

mengembangkan ekonomi dan sosialnya khususnya membangun industri dan sosial masyarakat Jepang yang telah hancur akibat kekalahan dalam perang. Sehingga Jepang sudah tidak memikirkan keamanan militer karena sudah ada jaminan dari AS yang tercantum dalam perjanjian keamanan antara Jepang dan AS. Jalan ini sengaja diambil oleh Jepang supaya memulihkan kekuatan sendiri lebih dulu. dengan kemajuan ekonomi dan industri Jepang maka Jepang dapat survival atau mempertahankan kelangsungan hidupnya dan membawa kesejahteraan ekonomi bagi bangsa dan negara Jepang. Dengan keuletannya maka pertumbuhan ekonomi Jepang melonjak 10 persen tiap tahun. Hal ini membawa Jepang menjadi raksasa ekonomi sesuai dengan visi bangsa Jepang untuk mencapai Kepentingan Nasionalnya.

Kemajuan ekonomi secara pesat yang dialami oleh Jepang telah memaksa Jepang untuk menjalin hubungan dagang dengan negara lain karena untuk memasarkan produksi industrinya. Persaingan dengan negara lain pun dilakukan Jepang untuk memasarkan produksi barangnya termasuk memperbaiki kualitas dan harga yang kompetitif. Selain itu kondisi politik internasional saat itu diwarnai konflik, seperti yang terjadi di timur tengah dan perang dingin antara AS dan Uni Soviet berpengaruh terhadap situasi perdagangan. konflik yang terjadi timur tengah secara tidak langsung memberi dampak buruk terhadap perekonomian Jepang karena impor suplai minyak dari timur tengah otomatis terganggu, padahal impor minyak Jepang sangat tergantung dari negara Arab, sedangkan saat itu terjadi konflik antara Arab dengan Israel. Politik luar negeri yang berorientasi energi dengan sendirinya

membawa Jepang pada kepentingan perdamaian dan stabilitas dunia secara maksimal. Dengan adanya konflik ini akan menghambat kepentingan nasional Jepang khususnya berkaitan dengan industrinya, maka Jepang ikut andil dalam menjaga ketertiban internasional supaya tercipta perdamaian di timur tengah.

### **3. Konsep Kedaulatan**

**Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Kedaulatan (Sovereignty)** adalah kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan keputusan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Kedaulatan tidak berarti bahwa negara memiliki kebebasan absolute (mutlak) dalam bertindak. Hubungan antar negara diatur oleh hukum internasional serta berbagai kaidah dari sejumlah organisasi internasional yang merupakan induk bagi negara yang menjadi anggotanya. Kedaulatan dapat diubah dengan kesepakatan pemerintahnya, selain rakyat. Kedaulatan secara tidak langsung mengungkapkan kesetaraan negara namun hanya dalam arti kesetaraan kapasitas untuk memiliki hak serta kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Negara berdaulat lebih lanjut dibatasi kebebasan bertindak oleh halangan informal yang diajukan oleh negara lain yang menuntut keselarasan kapabilitas dengan tujuan nasional tertentu.<sup>15</sup>

San Francisco Treaty adalah perjanjian perdamaian antara Jepang dengan sekutu (Negara-negara yang terlibat perang dengan Jepang pada PD II), selain itu juga Jepang diberikan Kedaulatan atas negaranya setelah masa pendudukan sekutu dalam pemerintahannya dan Jepang diakui kedaulatannya oleh negara-negara lain dalam hubungan internasional

Dengan ditandatangani perjanjian tersebut Jepang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai negara yang berdaulat seperti halnya negara lain. Dengan diakuinya kedaulatan tersebut Jepang memiliki sepenuhnya hak untuk mengatur pemerintahannya secara bebas dan mandiri tetapi juga terikat pada ketentuan-ketentuan lain pada hukum dan perjanjian internasional

#### **F. Hipotesa**

Untuk menjawab politik luar negeri seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pasca penandatanganan San Francisco Treaty, penulis mengambil hipotesa sebagai berikut :

*Pasca penandatanganan San Francisco Treaty politik luar negeri Jepang lebih terbuka dan damai, serta aktif dalam menjalin hubungan dengan negara lain dengan mengedepankan kepentingannya.*

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Library Reseach atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, buku, artikel, surat kabar, majalah, internet serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang relevan yang akan dijadikan penelitian ini

Sedangkan metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah deskriptif dan argumentative, dalam artian agar dapat memberikan gambaran serta menjawab pokok permasalahan tersebut.

#### **H. Jangkauan Penelitian**

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan. Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa jangkauan politik luar negeri Jepang pasca San Francisco Treaty, yang membahas dinamika politik luar negeri Jepang pasca penandatanganan perjanjian San Francisco pada tahun 1952. dengan pertimbangan bahwa setelah kekalahan Jepang PD II pada tahun 1945 kondisi Jepang berada dalam masa pendudukan tentara sekutu dan berakhir masa pendudukan ditandai dengan San Francisco Treaty. Maka penelitian dibatasi mulai dari 1945 hingga 1980.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta untuk menjelaskan uraian yang dimaksud

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB. I**

Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

Menjelaskan tentang gambaran Politik Luar Negeri Jepang sebelum adanya perjanjian San Francisco.

### **BAB III**

Menjelaskan tentang perjanjian San Francisco baik yang berhubungan dengan latar belakang, proses penandatanganan dan ratifikasi dan juga isi dari perjanjian tersebut.

### **BAB IV**

Menjelaskan tentang Politik Luar Negeri Jepang pasca penandatanganan San Francisco Treaty.

### **BAB V**

Merupakan rangkuman atau kesimpulan dari bab-bab pembahasan dan merupakan penutup dari skripsi ini